

Budaya Politik dan Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Politik Indonesia

Naufal Fadhilurrahman¹, Niaz Khan Ruvanvalisaya², Haikal Ramadhan³, Muhammad Vidal Javier⁴,
Farhan Aditia Sujaka⁵, Ainur Hafizah⁶

Universitas Nasional, Jakarta, Indonesia
e-mail: naufalfadhilurrahman1203@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji budaya politik di Indonesia, fokus pada pengaruhnya terhadap partisipasi masyarakat, bentuk-bentuk budaya politik, dan tantangan pengembangannya. Budaya politik di Indonesia dibagi menjadi tiga: parokial, subjek, dan partisipan, yang mencerminkan tingkat kesadaran dan keterlibatan masyarakat. Orientasi budaya politik meliputi aspek kognitif, afektif, dan evaluatif, yang mempengaruhi partisipasi politik. Tantangan utama meliputi ketimpangan pendidikan politik, rendahnya partisipasi politik, dan polarisasi politik akibat media sosial. Upaya untuk mengatasi tantangan ini termasuk peningkatan pendidikan politik dan manajemen pengaruh media sosial. Pemahaman mendalam tentang budaya politik ini penting untuk memperkuat demokrasi di Indonesia.

Kata Kunci: budaya politik, orientasi budaya politik

Abstrak

This research examines political culture in Indonesia, focusing on its influence on community participation, forms of political culture, and challenges to its development. Political culture in Indonesia is divided into three: parochial, subject, and participant, which reflects the level of awareness and involvement of society. Political cultural orientation includes cognitive, affective and evaluative aspects, which influence political participation. The main challenges include inequality in political education, low political participation, and political polarization due to social media. Efforts to address these challenges include increased political education and management of social media influence. A deep understanding of political culture is important to strengthen democracy in Indonesia.

Keywords: political culture, political orientation

PENDAHULUAN

Sistem politik membentuk kerangka utama yang mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem ini secara aktif mengatur kekuasaan, menetapkan beberapa prosedur pembuatan keputusan yang mengikat, serta menyelesaikan sejumlah konflik kepentingan antar individu maupun kelompok untuk menciptakan ketertiban sosial. David Easton menjelaskan bahwa sistem politik bekerja melalui proses interaksi input dan output yang terukur (Kultura Journal, n.d.). Dalam konteks Indonesia, sistem politik tidak hanya terbentuk dari struktur formal seperti lembaga negara (suprastruktur politik), tetapi juga melibatkan dinamika masyarakat (infrastruktur politik) yang mencakup partai politik, kelompok kepentingan, media massa, serta individu-individu yang aktif dalam kehidupan politik.

Di dalam sistem politik, budaya politik memainkan peran penting sebagai cerminan dari nilai, norma, dan orientasi masyarakat terhadap kehidupan politik dan pemerintahan. Gabriel Almond dan Sidney Verba mendefinisikan budaya politik sebagai pola sikap individu terhadap sistem politik dan elemen-elemennya, termasuk peranan mereka di dalamnya (Sujana & Kasim, 2021). Dengan kata lain, budaya politik adalah bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam sistem politik di sekitarnya.

Indonesia, sebagai negara dengan keanekaragaman budaya, memiliki corak budaya politik yang unik. Mulai dari budaya politik parokial yang masih bertumpu pada nilai-nilai tradisional dan lokal, hingga budaya politik partisipan yang mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik

modern. Budaya politik di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang perjalanan bangsa ini, mulai dari era kolonialisme, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Setiap periode tersebut membentuk dinamika budaya politik yang berbeda-beda, menciptakan tantangan dan peluang bagi perkembangan demokrasi di Indonesia.

Di Indonesia, budaya politik dapat secara umum dibagi menjadi tiga kategori utama: parokial, subjek, dan partisipan (Pureklolon, 2021). Sejumlah besar orang masih belum terpapar pada institusi politik modern, sehingga budaya politik parokial masih mendominasi di banyak daerah. Di sisi lain, ada tingkat kesadaran yang hadir dalam subjek budaya politik, namun, kesediaan mereka untuk berpartisipasi terbatas pada mematuhi hukum dan peraturan. Budaya di mana warga negara terlibat dalam pengambilan keputusan melalui pemilihan umum dan diskursus publik dikenal sebagai budaya partisipatif.

Berdasarkan pemahaman ini, makalah ini akan mengkaji budaya politik di Indonesia, mulai dari pengertian, bentuk-bentuk, hingga tantangannya dalam konteks sistem politik Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara budaya politik dan sistem politik, serta relevansinya dalam membangun demokrasi yang lebih inklusif dan partisipatif di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif untuk memahami bagaimana budaya politik memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem politik Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman masyarakat dalam berpartisipasi dalam politik. Penelitian ini bersifat deskriptif-eksploratif, yang bertujuan untuk memahami fenomena budaya politik dan bagaimana partisipasi politik masyarakat berkembang dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Budaya Politik

Budaya Politik merupakan situasi-situasi yang dapat memberikan corak dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan politik. Budaya politik sebagai suatu kejadian dalam masyarakat yang mempunyai pengaruh terhadap sistem politik dan struktur politik dalam masyarakat tersebut. Gabriel Almond dan Sidney Verba mengartikan budaya politik merupakan perilaku orientasi yang khusus dari warga negara pada sistem politik dan beragam segmennya, dan perilaku terhadap kontribusi masyarakat yang ada dalam sistem politik. Almond dan Verba memfokuskan kajian budaya politik pada cara alokasi pola-pola orientasi eksklusif dapat memperoleh tujuan politik dalam masyarakat tersebut (Gabriel, 1984).

Menurut Miriam Budiardjo mendefinisikan budaya politik sebagai keseluruhan dari falsafah-falsafah politik, semacam norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan falsafah hidup pada masyarakat (Miriam Budiardjo, 2008). Budaya politik memfokuskan pada aspek psikologis dari sistem politik, seperti perilaku-perilaku, sistem-sistem keagamaan, simbol-simbol dari tiap individu-individu, dan dapat berkerja pada seluruh aspek masyarakat, juga citacita dari masyarakat. Dengan kata lain budaya politik menjadi aspek penting pada sistem politik, dimana budaya politik dapat merefleksikan aspek subjektif dari sistem politik.

Menurut Sahya Anggara dalam bukunya menjelaskan tentang batasan dari konsep budaya politik (Sahya, 2014) yang sebagai berikut

- a. Konsep budaya politik menitikberatkan kepada perilaku non- aktual, seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan. Orientasi pada budaya politik yaitu sistem politik, sehingga dialog mengenai budaya politik selalu membicarakan sistem politik.
- b. Budaya politik adalah gambaran konseptual tentang komponen budaya politik pada tingkatan massif, atau menggambarkan masyarakat suatu negara atau wilayah, tidak per-individu.
- c. Konsep budaya politik yang mencakup dengan sifat perilaku, dogma, nilai-nilai dan pengetahuan yang dalam seluruh masyarakat, termasuk aspek kebiasaan yang berlaku pada masyarakat.

Orientasi muncul dari interaksi antar manusia yang satu dengan lainnya dalam masyarakat yang akan selalu berkaitan dengan pengetahuan, tata nilai, dan sikap seseorang. Budaya politik menurut Almond dan Verba dengan mengacu kepada Parsons dan Shils mengenai tipe-tipe orientasi, dalam budaya politik terdapat tiga orientasi (Gabriel, 1984) sebagai berikut:

- a. Orientasi kognitif, bersifat pengetahuan perihal keyakinan kepada politik, kontribusi, dan seluruh kewajiban juga input dan output dari sistem politik.
- b. Orientasi afektif bersifat perasaan atau pandangan atas sistem politik, kontribusinya, para tokoh, dan penampilanya.
- c. Orientasi evaluatif bersifat keputusan dan gagasan mengenai objek-objek politik yang menurut lazimnya mengimplikasikan parameter nilai dan kriteria informasi serta perasaan

Orientasi Budaya Politik

Sebagai bagian penting dari budaya politik, orientasi budaya politik mencerminkan cara individu dalam suatu masyarakat memahami, merasakan, dan mengevaluasi sistem politik mereka. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba dalam studi klasik mereka tentang budaya politik. Mengacu pada teori Talcott Parsons dan Edward Shils, Almond dan Verba menggambarkan orientasi budaya politik sebagai pola psikologis individu terhadap berbagai objek politik, yang meliputi aspek pengetahuan (kognitif), perasaan (afektif), dan penilaian (evaluatif).

- a. **Orientasi Kognitif**

Orientasi kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman individu tentang sistem politik. Hal ini mencakup informasi tentang struktur politik, proses pemerintahan, dan peran institusi-institusi politik. Menurut Almond dan Verba, orientasi kognitif juga mencakup simbol-simbol politik seperti lambang negara, ibukota, dan kepala negara. Individu dengan orientasi kognitif yang tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta cara-cara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Pengetahuan yang mendalam ini mendorong mereka untuk lebih aktif dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum, kampanye politik, dan diskusi publik.

- b. **Orientasi Afektif**

Orientasi afektif digambarkan dengan perasaan dan emosi individu terhadap sistem politik. Ini mencakup sikap positif atau negatif terhadap politik, serta tingkat keterlibatan emosional dalam isu-isu politik. Individu dengan orientasi afektif yang kuat mungkin merasa sangat terlibat dan emosional terhadap kebijakan politik tertentu, sehingga mereka cenderung berpartisipasi aktif dalam kegiatan politik. Misalnya, perasaan bangga terhadap negara atau kemarahan terhadap kebijakan yang tidak adil dapat memotivasi individu untuk terlibat dalam protes, petisi, atau kampanye politik. Contohnya gerakan reformasi pada akhir 1990-an menunjukkan bagaimana rasa tidak puas yang meluas terhadap Orde Baru memobilisasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam demonstrasi dan menuntut perubahan politik.

- c. **Orientasi Evaluatif**

Orientasi evaluatif berhubungan dengan bagaimana individu menilai sistem politik dan kebijakan yang dijalankan. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan sistem politik, serta memberikan umpan balik yang membangun. Individu dengan orientasi evaluatif yang kuat biasanya mampu mengevaluasi kualitas kebijakan yang diterapkan dan menawarkan saran yang konstruktif untuk perbaikan. Mereka sering terlibat dalam diskusi politik, menyampaikan pendapat melalui media, atau bergabung dengan organisasi politik untuk berkontribusi dalam memengaruhi kebijakan publik.

Bentuk-Bentuk Budaya Politik di Indonesia

Budaya politik di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu budaya politik parokial, subjek, dan partisipan. Pembagian ini membantu memberikan wawasan yang lebih luas mengenai pola interaksi masyarakat dengan sistem politik serta bagaimana mereka menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam konteks politik.

- a. **Budaya Politik Parokial**

Budaya politik ini mencerminkan masyarakat dengan tingkat kesadaran politik yang rendah. Individu dalam masyarakat ini tidak memiliki pengetahuan atau kepedulian terhadap sistem politik, dan mereka cenderung tidak terlibat dalam proses politik karena berbagai sebab seperti keterbatasan pendidikan politik, isolasi geografis, atau dominasi nilai-nilai tradisional. Misalnya Di beberapa daerah pedesaan di Indonesia, terutama yang terpencil, masyarakat masih cenderung memiliki budaya politik parokial. Mereka lebih banyak fokus pada kehidupan sehari-hari dan tradisi lokal daripada terlibat dalam proses politik nasional. Misalnya, masyarakat di beberapa desa terpencil di Papua mungkin tidak mengetahui atau tidak terlalu peduli dengan pemilu atau kebijakan pemerintah pusat.

b. Budaya Politik Subjek

Dalam budaya politik ini, masyarakat memiliki kesadaran terhadap keberadaan sistem politik, tetapi partisipasinya bersifat pasif. Mereka lebih fokus pada menerima kebijakan dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah tanpa banyak memberikan masukan. Mereka cenderung pasif, menerima peraturan dan keputusan politik tanpa banyak pertanyaan atau partisipasi aktif. Adapun ciri dari budaya politik ini adalah masyarakat yang memahami peran pemerintah, tetapi hanya sebagai penerima kebijakan, kemudian kritik terhadap sistem politik relatif rendah karena adanya ketergantungan kepada otoritas. Contoh nyata dalam budaya politik subjek dapat ditemukan di kalangan masyarakat perkotaan yang lebih terinformasi tetapi tidak terlalu aktif dalam politik. Misalnya, warga Jakarta yang mengetahui kebijakan pemerintah tetapi jarang terlibat dalam demonstrasi atau kegiatan politik lainnya. Mereka mungkin mengikuti berita politik dan memahami dampak kebijakan, namun tidak merasa terdorong untuk terlibat aktif.

c. Budaya Politik Partisipan

Budaya politik partisipan adalah bentuk budaya politik di mana masyarakat tidak hanya menyadari sistem politik yang berlaku, tetapi juga aktif terlibat dalam proses politik. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban mereka, serta berpartisipasi secara aktif dalam pemilu, kampanye politik, dan diskusi publik. Adapun ciri masyarakat yang memiliki budaya politik ini adalah mereka merasa memiliki tanggung jawab terhadap sistem politik, kritik, masukan, dan tuntutan terhadap pemerintah sangat tinggi, dan ikut serta dalam pemilu, demonstrasi, atau organisasi politik. Contoh nyata dalam budaya politik partisipan dapat dilihat pada masyarakat yang terlibat dalam gerakan reformasi pada akhir 1990-an. Mahasiswa, aktivis, dan berbagai elemen masyarakat lainnya berpartisipasi aktif dalam demonstrasi besar yang menuntut perubahan politik dan mengakhiri rezim Orde Baru. Contoh lainnya adalah partisipasi aktif masyarakat dalam pilkada atau pemilu presiden, di mana mereka terlibat dalam kampanye, menjadi saksi di TPS, atau ikut serta dalam pemantauan pemilu.

Tantangan dalam Pengembangan Budaya Politik yang Demokratis di Indonesia

a. Ketimpangan Pendidikan Politik

Ketimpangan dalam pendidikan politik di Indonesia menjadi salah satu hambatan utama dalam menciptakan budaya politik yang demokratis. Sebagian besar masyarakat masih kurang memahami proses politik, hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, serta pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Rendahnya pemahaman ini membuat masyarakat rentan terhadap pengaruh berita hoaks, propaganda politik, atau janji-janji yang tidak realistis dari aktor politik. Ketimpangan ini juga memperdalam kesenjangan antara kelompok yang memiliki akses pendidikan politik dengan mereka yang tidak, sehingga memperlemah fondasi demokrasi. Adapun hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Pendidikan kerwarganegaraan dari sekolah. Kurikulum sekolah harus diperkuat dengan materi yang mengajarkan hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam politik.
- 2) Pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dapat menyelenggarakan program pendidikan politik untuk masyarakat umum, khususnya di daerah terpencil atau kurang terjangkau.

- 3) Media massa dan media sosial dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi politik yang benar dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterlibatan politik.
- b. Rendahnya Partisipasi Politik
Rendahnya tingkat partisipasi politik di Indonesia menjadi tantangan serius dalam proses demokratisasi. Terutama di kalangan masyarakat dengan akses terbatas terhadap pendidikan politik, keikutsertaan mereka dalam aktivitas politik, seperti pemilu, diskusi publik, atau advokasi kebijakan, masih sangat minim. Kurangnya partisipasi ini berdampak pada pengambilan keputusan politik yang cenderung tidak merepresentasikan kepentingan semua kelompok masyarakat, sehingga memperlambat proses perubahan dan penguatan demokrasi. Adapun hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah perlu membuat mekanisme partisipasi yang lebih mudah dan inklusif, seperti platform digital untuk memberikan aspirasi atau masukan.
 - 2) Generasi muda perlu didorong untuk aktif dalam politik melalui program seperti debat politik di sekolah dan kampus, serta akses ke organisasi pemuda.
- c. Polarisasi Politik Akibat Media Sosial
Media sosial memainkan peran ganda dalam membentuk budaya politik di Indonesia. Di satu sisi, platform ini memberikan ruang yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan berpartisipasi dalam dialog politik. Namun, di sisi lain, media sosial sering kali menjadi medium penyebaran informasi yang salah, konten yang provokatif, dan narasi yang memecah belah. Polarisasi politik akibat konten semacam ini meningkatkan ketegangan antara kelompok yang berbeda pandangan dan menghambat dialog yang sehat serta solusi yang inklusif. Adapun hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut sebagai berikut:
 - 1) Kampanye literasi digital perlu ditingkatkan agar masyarakat mampu memilah informasi yang benar dan tidak mudah terprovokasi.
 - 2) Pemerintah dan penyedia platform harus bekerja sama untuk mengawasi dan menindak konten yang menyebarkan kebencian atau disinformasi.
- d. Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Budaya Politik
Media sosial memiliki potensi besar untuk membentuk budaya politik yang lebih inklusif dan partisipatif. Platform media sosial ini memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan menjangkau lebih banyak orang, sehingga dapat meningkatkan kesadaran politik dan mendorong keterlibatan masyarakat. Namun, media sosial juga berisiko menjadi alat untuk menyebarkan informasi yang manipulatif dan memperkuat bias politik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital masyarakat, khususnya dalam mengenali informasi yang valid, memahami dinamika politik, dan memanfaatkan media sosial secara positif untuk mendukung proses demokrasi. Upaya ini harus melibatkan pendidikan berbasis teknologi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta. Adapun hal yang bisa dilakukan dalam menghadapi tantangan tersebut sebagai berikut:
 - 1) Masyarakat perlu dididik tentang cara memanfaatkan media sosial secara konstruktif, seperti untuk diskusi politik yang sehat dan penyebaran informasi valid.
 - 2) Tokoh media sosial yang memiliki pengaruh besar dapat diajak untuk mempromosikan budaya politik yang inklusif dan anti- hoaks.
 - 3) Pemerintah dapat menetapkan regulasi yang lebih ketat terhadap penyebaran informasi palsu, sekaligus memastikan kebebasan berpendapat tetap terjaga.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari pembahasan ini menunjukkan bahwa Budaya politik di Indonesia terdiri dari tiga orientasi utama: kognitif, afektif, dan evaluatif. Orientasi kognitif melibatkan pengetahuan dan

pemahaman masyarakat terhadap sistem politik, termasuk struktur pemerintahan dan proses pemilu. Individu dengan orientasi kognitif yang tinggi umumnya lebih aktif dalam kegiatan politik karena memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Orientasi afektif berkaitan dengan perasaan dan emosi masyarakat terhadap sistem politik dan para pemimpinnya. Perasaan positif atau negatif terhadap politik dapat memengaruhi tingkat keterlibatan mereka, seperti rasa bangga terhadap identitas nasional atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah yang mendorong aksi politik. Sementara itu, orientasi evaluatif mencakup penilaian masyarakat terhadap efektivitas dan keadilan sistem politik serta kebijakan yang diterapkan. Individu dengan orientasi evaluatif yang kuat cenderung lebih kritis terhadap kebijakan pemerintah dan lebih aktif terlibat dalam berbagai aksi politik.

Budaya politik di Indonesia dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk utama: parokial, subjek, dan partisipan. Budaya politik parokial ditandai dengan sikap apatis atau kurangnya pemahaman masyarakat tentang sistem politik. Masyarakat dengan budaya ini biasanya tidak terlibat dalam proses politik, yang disebabkan oleh keterbatasan pendidikan politik atau pengaruh nilai-nilai tradisional. Budaya politik subjek, di sisi lain, mencerminkan masyarakat yang sadar akan keberadaan sistem politik, tetapi cenderung pasif dalam berpartisipasi. Mereka menerima keputusan dan aturan politik tanpa banyak pertanyaan atau keterlibatan aktif. Sebaliknya, budaya politik partisipan mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat dalam politik. Kelompok ini memiliki pemahaman yang baik tentang hak dan tanggung jawab mereka, serta terlibat dalam kegiatan seperti pemilu, kampanye politik, dan diskusi publik.

Namun, pengembangan budaya politik yang demokratis di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan besar, termasuk ketimpangan pendidikan politik, rendahnya tingkat partisipasi politik, dan polarisasi akibat media sosial. Ketimpangan dalam pendidikan politik menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi politik, yang kemudian menghambat proses demokrasi yang sehat. Selain itu, media sosial yang memiliki peran besar dalam membentuk budaya politik sering kali digunakan untuk menyebarkan informasi yang bias atau manipulatif, memperburuk polarisasi dan perpecahan di masyarakat.

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah strategis. Peningkatan pendidikan politik menjadi hal mendasar, melalui penguatan kurikulum di sekolah, program pelatihan bagi masyarakat, dan kampanye edukasi melalui media. Selain itu, mendorong partisipasi politik yang inklusif dapat dilakukan dengan menyediakan platform yang lebih mudah diakses, meningkatkan kesadaran melalui media, dan melibatkan generasi muda secara aktif. Pengelolaan media sosial secara bijaksana juga sangat penting, termasuk literasi digital untuk masyarakat, pengawasan terhadap konten yang memecah belah, dan kolaborasi dengan platform media sosial untuk mendorong penyebaran informasi yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Syamsari, U., Faisal, F., Winata, M., Nur Afifah, A., Assa'addah, H., Indriana, H., & Aditya Putra, R. (2024). Perbandingan orientasi dan budaya politik antara etnis Sunda dengan etnis Makassar. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 5871–5884. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.11180>
- Aulia, B. (2023). Dinamika politik Indonesia saat ini: Tantangan dan peluang menuju masa depan. *Kompasiana*. Diakses pada 3 Desember 2024, dari <https://www.kompasiana.com/bungaaulia9874/6572e66a12d50f41b26e4c72/dinamika-politik-indonesia-saat-ini-tantangan-dan-peluang-menuju-masa-depan>
- Effendy, O. U. (2003). Ilmu, teori, dan filsafat komunikasi. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gabriel, A. (1984). Budaya politik tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara. Bina Aksara.
- Hasan, F. (2024). Analisis kategori budaya politik: Pendekatan Almond dan Powell. *Fokus*. Diakses pada 3 Desember 2024, dari <https://www.fokus.co.id/edu/analisis-kategori-budaya-politik-pendekatan-almond-dan-powell>

- Humaira, Natasya. (2024). Budaya Politik di Indonesia Beserta Ciri-cirinya. DetikNews. Diakses pada 30 Januari 2025, dari <https://news.detik.com/berita/d-6798150/budaya-politik-di-indonesia-beserta-ciri-cirinya>.
- Info Hukum. (2025). Budaya Politik di Indonesia. Diakses pada 30 Januari 2025, dari <https://fahum.umsu.ac.id/info/budaya-politik-di-indonesia/>.
- Isabela, M. A. C., & Nailufar, N. N. (2022, Februari 17). Budaya politik menurut Almond dan Powell. Kompas. Diakses pada 3 Desember 2024, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/17/00000071/budaya-politik-menurut-almond-dan-powell?form=MG0AV3>
- Kultura Journal. (n.d.). Penerapan teori sistem David Easton dalam proses pembuatan kebijakan penggunaan pekerja asing di Indonesia. Diakses dari <https://jurnal.kolibi.org/index.php/kultura/article/view/1526>
- Mas'ood, M., & MacAndrews, C. (1986). Perbandingan sistem politik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miriam Budiardjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Moeljarto, T. (2000). Politik pembangunan: Sebuah analisis konsep, arah, dan strategi. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Odi, R. (2023). Pengaruh literasi politik terhadap budaya politik partisipan mahasiswa PPKN FKIP Universitas Lampung. Diakses dari <http://scholar.unand.ac.id/466017/>
- Putra, A. (2024). Pendanaan politik: (Korelasi kuat antara politik, uang, dan korupsi dalam konteks pemilihan umum di Indonesia). Diakses dari http://repository.dharmawangsa.ac.id/713/1/Book_Pendanaan%20Politik-1.pdf
- Putri, N. R. (2024). Membangun budaya politik yang transparan dan bersih demi demokrasi Indonesia. Kumparan. Diakses pada 3 Desember 2024, dari <https://kumparan.com/naylasashi-r-putri/membangun-budaya-politik-yang-transparan-dan-bersih-demi-demokrasi-indonesia>
- Pureklolon, T. T. (2021). An analysis of Jakarta's democracy and political power in 2019. Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 6(1), 128–144. Diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/jpi/article/view/25713>
- Sahya, A. (2014). Kebijakan publik. CV Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2006). Sosiologi: Suatu pengantar. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Verba, S., Nie, N. H., & Kim, J. O. (1978). Participation and political equality: A seven-nation comparison. Cambridge University Press.
- Wahab, A. (2008). Budaya politik Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja, A. W. (2003). Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.